

Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah

Mufti Arief Arfiansyah

Program Studi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri
alarief1989@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari dana desa dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Penelitian ini mengacu pada pendekatan deskriptif kuantitatif dengan populasi Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Penentuan sampel dengan teknik *purposive* sampling. Proses pengumpulan data menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan. Data penelitian dalam penelitian ini adalah Pagu Dana Desa, Pendapatan Domestik Bruto dan jumlah penduduk miskin di kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015-2019. Analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan software Eview 10.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) dana desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Semakin meningkat dana desa semakin turun angka kemiskinan. 2) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, semakin tinggi Pendapatan Domestik Bruto semakin rendah angka kemiskinan.

Kata Kunci: Dana Desa, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of village funds and economic growth on poverty. This study refers to a quantitative descriptive approach to the population of regencies in Central Java Province. Determination of the sample by *purposive* sampling technique. The data collection process uses secondary data from the Central Statistics Agency and the Ministry of Finance. The research data in this study are the Village Funds Ceiling, Gross Domestic Income and the number of poor people in districts in Central Java Province from 2015-2019. Data analysis using panel data regression analysis with the help of Eview 10 software.

The results showed that 1) village funds had a negative effect on poverty. The higher the village funds the smaller the poverty rate. 2) Economic growth has a negative effect on poverty, the higher the Gross Domestic Income the lower the poverty rate.

Keywords: Village Funds, Economic Growth, Poverty

PENDAHULUAN

Persoalan pembangunan di Indonesia yang paling mendasar adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi permasalahan yang tak kunjung usai di berbagai daerah. Perhatian khusus terhadap penanggulangan kemiskinan menjadi fokus dari program-program kerja di seluruh daerah. Kemiskinan membuat proses pembangunan banyak mengalami permasalahan dan hambatan dengan tumbuhnya

penyakit sosial ekonomi di dalam masyarakat. Angka kemiskinan di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Laju penurunan kemiskinan berjalan lambat dan cenderung tetap selama lima tahun terakhir. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hanya berkurang dari 28,59 juta jiwa atau 11,22% dari total penduduk Indonesia pada Maret 2015 menjadi 25,14 juta jiwa (9,41%) pada Maret 2019. Data itu menunjukkan dalam kurun lima tahun hanya berkurang 3,45 juta jiwa dan presentase penurunan tingkat kemiskinan 1,81%. Sedangkan data kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan hanya berkurang dari 4,57 juta jiwa atau 14,21% dari total penduduk Jawa Tengah pada Maret 2015 menjadi 3,74 juta jiwa (12,85%) pada Maret 2019. Data itu menunjukkan dalam kurun lima tahun berkurang sekitar 830 ribu jiwa dan presentase penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,36 %.

Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,02% pada Maret 2015 dan sebesar 1,32% pada Maret 2019. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung di garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2015 di wilayah perkotaan sebesar 2,44% dan Indeks kedalaman kemiskinan di pedesaan sebesar 2,80%, masing-masing menurun pada Maret 2019 sebesar 1,75% dan 1,53%. Berdasarkan data Indeks Kedalaman Kemiskinan tersebut, angka kemiskinan penduduk pedesaan jauh lebih besar dibandingkan dengan perkotaan. Data menunjukkan bahwa presentase penduduk miskin desa pada Maret 2019 masih mencapai 15,14 juta jiwa. Angka tersebut jauh lebih tinggi daripada presentase penduduk miskin perkotaan yang hanya 9,99 juta jiwa .

Upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai program yang terintegrasi antara lain program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat dan berbasis pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan berbagai tingkat pemerintahan daerah (Aghnia, 2018). Salah satu upaya pemerintah adalah menjadikan desa sebagai prioritas pembangunan pemerintah sesuai Nawa Cita pemerintah yaitu pembangunan dari pinggiran.

Pembangunan berbasis perdesaan memiliki peranan penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara. Desa menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan negara karena masyarakat secara mayoritas tinggal di dalamnya. Pembangunan desa akan mempercepat penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah berkurang. Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa mempunyai posisi strategis sebagai basis pembangunan. Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa (Prasetyo, 2014).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadikan desa sebagai prioritas pembangunan nasional. Tujuan utama dari undang-undang desa untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-undang tersebut telah menggeser pendekatan pembangunan terhadap desa dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan.

Prioritas pembangunan desa melalui dana desa menggeser pusat tata kelola pemerintahan dari pusat berpindah dan berkembang di daerah. Peningkatan kualitas pelayanan dan percepatan pembangunan serta pertumbuhan daerah menjadi tujuan utama perpindahan tata kelola pemerintahan. Desentralisasi tidak hanya hirarki pemerintahan tetapi desentralisasi fiskal pemerintah pusat ke pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun pemerintah desa. Desentralisasi fiskal sebagai kosekuensi otonomi daerah memberikan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa untuk membelanjakan anggarannya yang berorientasi pada kepentingan publik khususnya penanggulangan kemiskinan.

Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing (Pahlevi, 2015). Dalam rangka mencapai target RPJMN 2020-2024 dalam membangun desa mandiri alokasi anggaran nasional untuk dana desa sebesar Rp 400 Triliun selama lima tahun kedepan hingga 2024. Setiap tahun anggaran dana desa dimungkinkan mengalami peningkatan. Total anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun selama lima tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya sejak tahun 2015 hingga 2019. Rinciannya Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 Triliun (2017), Rp 60 Triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019) (Kompas.com, 2019).

Tujuan penggunaan dana desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dalam mengelola sumber daya dan potensi yang ada dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan ternagkat dari kemiskinan. Dengan anggaran dana desa, desa memiliki kesempatan mengembangkan ekonomi masyarka, melalui pelatihan dan pemasaran hasil produk masyarakat, pengembangan usaha peternakan, pertanian atau perkebunan masyarakat, pengembangan kawasan wisata, pembentukan BUMDes. Dengan penggunaan dana desa tersebut, masyarakat desa dapat meningkat perekonomiannya dan terangkat dari kemiskinan.

Kementrian Desa PDTT mencatat Dana Desa sejak Tahun 2015 hingga Semester 1 tahun 2019, mampu membangun 201.899 Km jalan desa, 1.181 km jembatan, 9.329 unit pasar desa, 48.953 unit sumur, 4.265 unit embung, 31.376 Km drainase, 60.274 unit irigasi, 53.002 unit PAUD, 10.101 unit

polindes, 26.271 posyandu. Juga telah berhasil membangun 198.244 unit penahan tanah, 5.605 unit tambahan perahu, 966.350 unit air bersih dan 260.039 unit MCK, pendirian BUMDes 38.140, dan sarana olahraga 21.118 unit. Data output penggunaan dana desa selama lima tahun diarahkan pada penunjang aktivitas ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan hasil output dana desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengangkat dari kemiskinan.

Angka kemiskinan dapat ditekan dengan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator dari peningkatan pendapatan beberapa sector. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama 2015-2019 menunjukkan tumbuh positif, walaupun masih di bawah 7 %. Pada tahun 2015 tumbuh 5,58%, tahun 2016 sebesar 5,07%, tahun 2017 lebih cepat pertumbuhannya sebesar 5,32% sedangkan tahun 2018 sebesar 5,41% dan tahun 2019 sebesar 5,62% (Sugiyono, 2019). Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pertumbuhannya hampir merata di semua sector usaha.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2015-2019 telah berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka dan menurunkan tingkat kemiskinan penduduk. Angka Kemiskinan Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 13,58% dan turun menjadi 10,8% tahun 2019. Berdasarkan data ini, maka pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah telah tumbuh menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif yaitu pertumbuhan meluas antar sektor atau intensif terhadap tenaga kerja (Sugiyono, 2019). Dengan kata lain, bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah telah melibatkan partisipasi semua pihak tanpa diskriminasi dan mampu melibatkan seluruh sector ekonomi. Pelibatan partisipasi semua sector ekonomi sebagai indikator meningkatnya pertumbuhan ekonomi termasuk partisipasi sector ekonomi ditingkat desa. Desa menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi mengingat desa kini menjadi sentral pembangunan pemerintah melalui Dana Desa.

Peningkatan anggaran dana desa dari tahun ke tahun dan mampu membangun berbagai fasilitas fisik di desa belum sepenuhnya menekan angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan dalam kurun lima tahun hanya sebesar 1,81 %. Sedangkan angka kenaikan anggaran dana desa sebesar 4% selama lima tahun. Data-data statistik menunjukkan bahwa kemiskinan di Jawa Tengah masih tergolong tinggi walaupun pada periode Maret-September 2019 menjadi provinsi penurunan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia (Tempo.co, 2020). Namun, sejak dana desa digulirkan dari tahun 2015 angka kemiskinan di Jawa Tengah turun sebesar 18,16 % dan angka kemiskinan di Jawa Tengah hanya turun sebesar 830 ribu jiwa dari 4,57 juta jiwa menjadi 3,74 juta jiwa (BPS 2020). Akan tetapi penurunan angka kemiskinan tersebut belum menjadi indikator keberhasilan dana desa dalam mencapai tujuan utamanya.

Berdasarkan data-data diatas menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang tidak mudah untuk diatasi, hal tersebut juga berlaku di Jawa Tengah yang masih memiliki banyak penduduk

miskin. Walaupun sudah banyak kebijakan yang diterapkan, kemiskinan masih saja menjadi perhatian utama sebagai upaya meningkatkan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah. Berdasarkan data dari BPS menunjukkan persebaran terbesar jumlah orang miskin masih terpusat di wilayah pedesaan. Dengan adanya dana desa diharapkan program pengentasan kemiskinan menjadi lebih efektif karena jumlah orang miskin terbesar berada di wilayah pedesaan. Sehingga, berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana desa dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.

Dana Desa

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggariskan bahwa pada dasarnya pengalokasian Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan tersebut antara lain dijelaskan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan dana desa menerapkan konsep swakelola yaitu murni direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintahan desa dan masyarakat diharuskan mengatur dan melaksanakan kegiatan secara mandiri dengan tujuan memberikan kesempatan dan keterlibatan masyarakat desa secara langsung dalam pembangunan. Sehingga masyarakat desa dapat meningkatkan kemampuan ekonominya dan terlepas dari kemiskinan. Partisipasi dan pengawasan dari masyarakat dalam penggunaan dana desa dimaksudkan agar tujuan dana desa dalam menciptakan desa mandiri dapat terwujud (Arfiansyah, 2020).

Desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola penyelenggaraan pemerintah desa. Kewenangan desa dalam mengatur bidang-bidang kegiatan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa melalui dana desa diarahkan dan diatur oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan dalam ketiga bidang tersebut. Bidang-bidang tersebut diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan pemberian dana desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat agar memiliki kemampuan dalam melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat terpenuhi kebutuhannya. Penggunaan dana desa dalam bidang-bidang tersebut dalam rangka memberikan kesempatan dan kemampuan masyarakat untuk melepaskan diri dari kemiskinan.

Pertumbuhan Ekonomi

Para ekonom menggunakan data produk domestik bruto (PDB) yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian untuk mengukur pertumbuhan ekonomi (Mankiw 2007). Dalam Tambunan (2003) pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi disertai dengan partisipasi masyarakat dalam hal pemerataan pendapatan kepada masyarakat akan mampu memberikan konsekuensi menurunnya kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tanpa adanya pemerataan pendapatan kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin, maka justru pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesenjangan dan peningkatan kemiskinan.

PDB dapat diukur dengan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai output dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. Badan Pusat Statistik (BPS) membagi ekonomi nasional ke dalam 9 sektor, yaitup pertanian, Pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan, Listrik, gas dan air bersih, Bangunan, Perdagangan, hotel dan restoran, Pengangkutan dan komunikasi, Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, Jasa-jasa.

Maka PDB dapat dikatakan sebagai jumlah keseluruhan nilai output dari sembilan sektor tersebut. Sedangkan melalui pendekatan pendapatan, PDB adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di masing-masing sektor, seperti tenaga kerja (gaji/upah), pemilik modal (bunga/hasil investasi), pemilik tanah (hasil jual/sewa tanah), dan pengusaha (keuntungan bisnis/perusahaan). Semua pendapatan ini dihitung sebelum dipotong oleh pajak penghasilan dan pajak-pajak langsung lainnya. Dalam pendekatan ini, penghitungan PDB mencakup penyusutan dan pajak-pajak tidak langsung neto. Sehingga PDB dapat dirumuskan sebagai jumlah nilai tambah bruto dari keempat faktor produksi.

Kuncoro (2013) menjelaskan bahwa untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu, PDB dihitung atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku atau disebut PDB nominal, menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan atau disebut PDB riil, menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan dengan standar garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati orang lain serta suramnya masa depan bangsa dan negara (Wiguna & Rachmad, 2013).

Secara khusus kemiskinan kemudian diukur dengan membandingkan antara pendapatan atau konsumsi setiap individu dengan beberapa standar yang telah ditetapkan dimana mereka telah dianggap miskin apabila pendapatan atau konsumsi mereka berada di bawah standar tersebut (Haughton & Khandker, 2012). Berdasarkan Badan Pusat Statistik, kemiskinan diukur berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dari sisi pengeluaran (BPS, 2020).

Tinggi atau rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yakni tingkat pendapatan nasional rata-rata dan lebar atau sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Kedua faktor tersebut harus beriringan dan proporsional. Pendapatan nasional rata-rata tergolong tinggi tanpa adanya pelibatan masyarakat, pemerataan pendapatan, maka akan semakin meningkatkan kesenjangan di masyarakat. Sehingga akan meningkatkan angka kemiskinan. Begitupun sebaliknya, jika distribusi pendapatan yang merata di suatu negara, tetapi tingkat pendapatan nasional rata-ratanya rendah, maka kemiskinan juga akan semakin meningkat. Para ekonom pembangunan menggunakan konsep kemiskinan absolut untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar akan makanan, pakaian, dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan

Dana desa memiliki tujuan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemberian dana desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan kegiatan dan operasional pemerintahan yang berorientasi pada tujuan tersebut. Pemberian dana desa dihaaruskan pemerintah desa memprioritaskan pada pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Dengan pemberian dana desa kepada pemerintah desa, diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dapat mengentaskan dari kemiskinan. Dana desa tersebut dapat digunakan berbagai program kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan dan pembinaan

usaha kecil, pengembangan pertanian dan peternakan masyarakat ataupun membentuk Badan Usaha Milik Desa sebagai peningkatan unit usaha masyarakat.

Penelitian Setianingsih (2016) menunjukkan bahwa variabel Dana Desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan sebesar 0,398%. Artinya bahwa dengan bertambahnya Dana Desa sebesar 1% maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,398%. Penelitian Azwardi & Sukanto (2014) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis inferensial dalam bentuk data time series menunjukkan hasil penelitian bahwa adanya pengaruh negatif antara Alokasi Dana Desa terhadap kemiskinan. Penelitian Putra (2018), menunjukkan peningkatan dana desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Begitu juga penelitin Wahyudin, dkk (2019) dan Sunu & Utama (2019) menunjukkan hasil bahwa dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Akan tetapi, penelitian Lalira, dkk (2018), Rimawan&Aryani (2019) dan Harmiati dkk (2019) menunjukkan hasil yang berbeda, dana desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan temuan empiris tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah

H1 : dana desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi di ukur dengan pendapatan domestic bruto (PDB). Besaran PDB berdasarkan jumlah dari nilai tambah bruto dari sembilan sektor ekonomi untuk menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonominya. Nilai dari kesembilan sektor tersebut dihasilkan dari berbagai aspek lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Nilai dari PDB tersebut akan mendorong aktivitas perekonomian di masyarakat yang akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan akan meberikan kemandirian dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Masyarakat akan meningkat kesejahteraannya sehingga mampu terbebas dari kemiskinan.

Penelitian Widiyanto dkk, (2014) menunjukkan bahwa dari hasil uji koefisien parameter antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu penelitian Saputra (2011) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB yang telah diuji dengan menggunakan model *Fixed Effect* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan secara simultan berpengaruh signifikan dan secara persial juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.

Rusdarti & Sebayang (2013) dalam penelitiannya mendeskripsikan kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran, dan belanja publik terhadap kemiskinan. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa perkembangan jumlah

penduduk miskin dari tahun 2006 cenderung menurun pada tahun 2007, namun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan perubahannya hal itu ditunjukkan pada kurva yang tidak terlalu mengalami pergeseran.

Safitri (2015) pada penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada taraf nyata 5% namun dengan pengaruh yang berbeda. Di luar dugaan, pertumbuhan ekonomi ternyata berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian Susilowati, Susilowati & Hadi (2017) menunjukkan produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. Penelitian Hodijah (2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Berbeda dengan penelitian Pananrangi (2012) yang menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengurangi kemiskinan di Sumatera Selatan. Begitu juga hasil penelitian Hambarsari & Inggit (2017) menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Penelitian Romi & Umiyati (2018) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Jambi. Dengan demikian, maka hipotesisnya adalah

H2 : pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

METODE PENELITIAN

Desain penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yaitu analisis regresi data panel yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen Dana Desa (X1) dan Pertumbuhan Ekonomi (X2) terhadap variabel dependen kemiskinan (Y). Data Panel adalah data kombinasi antara data silang tempat *cross-section* dengan data runtun waktu *time series*. (kunchoro 2011). Variabel Dana Desa diukur dengan pagu dana desa tahun 2015-2019. Variabel pertumbuhan ekonomi diukur dengan pendapatan domestik Bruto (PDB) dengan harga konstan tahun 2015-2019. Sedangkan kemiskinan diukur dengan jumlah penduduk miskin.

Sumber data penelitian berasal dari data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan. Populasi penelitian adalah seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Proses analisis data menggunakan program *evIEWS 10* dan *Microsoft Excel*. Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel yaitu *pooling least square (common effect)*, pendekatan efek tetap (*fixed effect*), pendekatan efek random (*random effect*) dengan menguji kesesuaian model uji Chow, dan uji Hausman. Pengujian hipotesis dengan uji koefisien determinan, uji F dan uji t.

Uji Kesesuaian Model

Pooled Least Square (*Common Effect*)

Common Effect, metode ini menggabungkan data *cross section* dengan *time series* dan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel (Widarjono, 2009).

Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Fixed effect adalah model dengan *intercept* berbeda-beda untuk setiap subjek (*cross section*), tetapi *slope* setiap subjek tidak berubah seiring waktu (Gujarati, 2012). Dengan membedakan satu subjek lainnya digunakan *variabel dummy* (Kunchoro 2012). Model ini sering disebut dengan model *Lest Square Dummy Variables*.

Random Effect

Random Effect, pendekatan ini disebabkan variasi dalam nilai dan hubungan antar subjek diasumsikan random yang dispesifikan dalam bentuk residual (Kunchoro, 2012).

Model terbaik dalam analisis data panel ditentukan dengan menguji statistik melalui Uji Chow dan Uji Hausman. *Chow Test* merupakan uji untuk membandingkan model *common effect* atau *fixed effect* (Widarjono, 2009). *Chow test* dalam penelitian ini menggunakan program *Eviews*. Hipotesis yang dibentuk dalam *Chow Test* adalah sebagai berikut :

H_0 : Model *Common Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

H_0 ditolak jika P-Value lebih kecil dari nilai α . Sebaliknya, H_0 diterima jika P-Value lebih besar dari nilai α . Nilai yang digunakan sebesar 5%.

Tabel 1
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	226.725174	(28,114)	0.0000
Cross-section Chi-square	585.443717	28	0.0000

Sumber: Hasil *eviews* 10, 2020

Berdasarkan hasil pengujian Uji Chow menunjukkan nilai probabilitasnya sebesar 0.0000 (Nilai Prob < 0,05) maka model *fixed effect* dipilih daripada *common effect*. Selanjutnya, pengujian *fixed effect* dengan *random effect* melalui uji Hausman. Pengujian Hausman membandingkan model *fixed effect* dengan *random effect* dalam menentukan model yang terbaik sebagai model regresi data panel. Hipotesis dalam *Hausman test* adalah sebagai berikut :

H_0 : Model *Random Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

H_0 ditolak jika P-Value lebih kecil dari nilai α . Sebaliknya, H_0 diterima jika P Value lebih besar dari nilai α . Nilai α yang digunakan sebesar 5%.

Tabel 2
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	32.953129	2	0.0000

Sumber: Hasil eviews 10, 2020

Hasil pengujian Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0000 (Nilai Prob < 0.05) maka model *fixed effect* dipilih daripada *random effect*. Maka metode terbaik yang harus digunakan adalah fixed effect.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan bukti empiris terkait pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rerata populasi atau nilai rerata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang ingin diketahui (Ghozali, 2011: 98). Persamaan regresi yang digunakan adalah persamaan regresi linear data panel. Pada Tabel berikut ini ditampilkan hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi linear data panel model Fixed Effect.

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Fixed Effect

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Sample: 2015 2019
Periods included: 5
Cross-sections included: 29
Total panel (balanced) observations: 145

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	207951.6	8324.980	24.97923	0.0000
X1	-6.34E-08	1.73E-08	-3.661434	0.0004
X2	-0.001745	0.000332	-5.253461	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.983380	Mean dependent var		139400.7
Adjusted R-squared	0.979006	S.D. dependent var		62370.30
S.E. of regression	9037.063	Akaike info criterion		21.24311
Sum squared resid	9.31E+09	Schwarz criterion		21.87951
Log likelihood	-1509.125	Hannan-Quinn criter.		21.50170
F-statistic	224.8347	Durbin-Watson stat		1.539320
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil eview 10, 2020

Berdasarkan hasil uji regresi linear model fixed effect di atas, maka persamaan regresi penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

$$Y=207951,6 - 6,34DD - 0,001745PDRB+ \varepsilon_{it}$$

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan atau uji F terlihat dalam Tabel 3 diatas variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam model fixed effect yang hasil pengujian memiliki Nilai F-statistik sebesar 224.8347 sedangkan F tabel besarnya α 5% dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator $(k-1/3)=2$ dan df untuk denominator $(n-k/145-3)=142$ sebesar 3.06 (F hitung > F Tabel), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Pada Tabel 3 menunjukkan besarnya nilai R sebesar 0.983380, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan nilai *adjusted R Square* sebesar 0.979006 hal ini menunjukkan bahwa variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 97,9 %. Sementara itu, sisanya sebesar 2,1 % (100%-97,9%) dipengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor lain di luar model yang diteliti.

Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan

Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan

Berdasarkan perhitungan, nilai t statistik sebesar -3.661434 lebih besar dari t tabel dengan α 5% sebesar 1,65566 (t statistik -3.661434 > t tabel 1,65566) dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Hal itu menunjukkan bahwa dana desa memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dana desa memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan. Setiap peningkatan dana desa akan menurunkan kemiskinan. Hasil ini menunjukkan bahwa pemberian dana desa kepada pemerintah desa dapat menjadi cara tepat dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dana desa yang diberikan langsung bersentuhan dengan pokok permasalahan kemiskinan desa sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di desa. Dana desa dimanfaatkan dalam hal program-program pembangunan, pembinaan dan pemberdayaa masyarakat. Sehingga dana yang dianggarkan pemerintah desa memberikan rangsangan bagi masyarakat miskin untuk bangkit dalam memotong rantai kemiskinan.

Penggunaan dana desa dalam hal pembangunan desa, memberikan kemudahan dan kelancaran akses masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan pokok seperti kesehatan dan pendidikan. Dana desa digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Sehingga masyarakat miskin dapat memperoleh akses dengan mudah. Begitu juga dalam bidang pembinaan masyarakat desa, pemafaat dana desa telah menyasar pada hal-hal mendasar masyarakat agar terbina kehidupannya melalui kegiatan pembinaan masyarakat seperti penyuluhan hidup sehat, penerapan hunian sehat dan program-program pembinaan lainnya. Pembinaan ini mampu merubah pola pikir dan pola laku masyarakat miskin melalui kegiatan yang dianggarkan dana desa sehingga masyarakat dapat terangkat dari kemiskinan.

Dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat dapat menurunkan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat memberikan akses dan pengembangan potensi desa dan masyarakat sehingga mampu menghasilkan produk maupun karya yang mampu meningkatkan daya dukung desa dalam mengurangi kemiskinan. Masyarakat dapat berkembang kemampuannya dan mampu mengembangkan potensi yang ada sehingga dapat memberikan cara untuk terlepas dari kemiskinan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Setianingsih (2016) menunjukkan bahwa variabel Dana Desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan sebesar 0,398%. Artinya bahwa dengan bertambahnya Dana Desa sebesar 1% maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,398%. Penelitian Azwardi & Sukanto (2014) menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif antara Alokasi Dana Desa terhadap kemiskinan. Penelitian Putra (2018), menunjukkan peningkatan dana desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Begitu juga penelitin Wahyudin, dkk (2019) dan Sunu & Utama (2019) menunjukkan hasil bahwa dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun, tidak sesuai dengan penelitian Lalira, dkk (2018), Rimawan&Aryani (2019) dan Harmiati dkk (2019) menunjukkan hasil yang berbeda, dana desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan nilai t statistik sebesar -5.253461 lebih besar dari t tabel dengan α 5% sebesar 1,65566 (t statistik -5.253461 > t tabel 1,65566), artinya pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan nilai probabilitas sebesar 0,0004 lebih kecil dari 0,05 ($0,0004 < 0,05$) artinya bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi memberikan dampak signifikan terhadap kemiskinan. Semakin meningkat pertumbuhan ekonomi semakin menurunkan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat memberikan indikasi bahwa sektor-sektor produksi seperti pertanian, perdagangan, industri, pertambangan dan lainnya mampu memberikan kontribusi dan mampu melibatkan masyarakat

miskin dalam operasional dan dampaknya sehingga mampu menurunkan kemiskinan. Faktor-faktor produksi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam siklus ekonomi sehingga masyarakat miskin dapat ikut berkembang kemampuan ekonominya maupun mendapatkan kemudahan akses dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Hal ini memberikan tekanan kepada angka kemiskinan sehingga dapat menurunkan kemiskinan.

Hasil penelitian Susilowati, Susilowati & Hadi (2017) menunjukkan produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur. Penelitian Hodijah (2017) dengan judul pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, PAD terhadap Kemiskinan melalui Kesempatan Kerja di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Berbeda dengan penelitian Pananrangi (2012) yang menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengurangi kemiskinan di Sumatera Selatan. Begitu juga hasil penelitian Hambarsari & Inggit (2017) menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Penelitian Romi & Umiyati (2018) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Jambi

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, semakin meningkat dana desa akan menurunkan kemiskinan. Dana desa digunakan secara tepat dalam bidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, semakin meningkat pertumbuhan ekonomi semakin menurun kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi mampu melibatkan dan berdampak pada masyarakat miskin. Beberapa saran yang dapat ditindaklanjuti pada penelitian lanjutan antara lain menggunakan variabel tambahan dan analisis berbeda. Variabel dana desa dan pertumbuhan ekonomi menjelaskan 97,9 % terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, maka pada penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengembangkan hasil penelitian ini dengan menggunakan alat analisis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, M.A. 2020. Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, Vol. 3 No. 1, Januari-Mei 2020, hlm. 68-82.
- Azwardi & Sukanto. 2014. Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.12, No.(1), hlm: 29-41.
- BPS Provinsi Jateng. 2020. Definisi Kemiskinan.
- BPS Provinsi Jateng. 2020. Definisi Produk Domestik Regional Bruto.

- BPS Provinsi Jateng. 2015-2019. Data Penduduk Miskin.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Kementerian Keuangan Indonesia.
- Hambarsari, D. P & Inggit, K. 2017. Analisis Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2004-2014. *Jurnal ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2, September 2016 hlm. 257-282.
- Haughton, J., & R. Khandker. 2012. *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hodijah, S. 2017. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, PAD terhadap kemiskinan melalui kesempatan kerja di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia* Vol. 4, No. 2 November 2017, hlm. 156-173.
- Intan Mala Sari dan M Faisal Abdullah, 2017. *Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Kuncoro M. 2013. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta (ID): UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Lalira, D., dkk. 2018. Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di kecamatan Gemeh Kabupaten Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 18 No. 04 Tahun 2018, hlm. 62-72.
- Mankiw NG. 2007. *Makroekonomi*. Edisi Keenam. Jakarta (ID): Penerbit Erlangga. Terjemahan dari: *Macroeconomics*. 6th Edition.
- Pananrangi, A.I.A. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Plano Madani* Vol. 1 No. 1 2012 hlm. 29-38.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Putra, H. S. 2018. Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Aceh. *Jurnal Analisis Kebijakan*, Vol.2 No. 2 Tahun 2018, hlm. 51-61.
- Rimawan, M & Aryani, F. 2019. Pengaruh Alokasi dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia serta Kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 9 No. 3 September-Desember 2019, hlm. 287-295.
- Romi, S & Umiyati, E. 2017. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi. *E-jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* Vol. 7 No. 1, Januari-April 2018, hlm. 1-7.
- Rusdarti, Sembayang LK. 2013. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Economia*, Volume 9 No. 1 April 2013
- Safitri, RI. 2015. *Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan : Analisis Data Provinsi di Indonesia 2010*. [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Saputra, W., A. 2011. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.
- Setianingsih, I. 2016. Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi.
- Sugiyono, L. 2019, 4 Oktober. Inklusifkah Ekonomi Jateng?. Diakses dari <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/200753/inklusifkah-ekonomi-jateng>
- Suliswanto, M. S. W. 2010. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap angka kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 8, No.2. hlm: 357–366.
- Sunu, M. K. K. & Utama, M. S. 2019. Pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan dan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/ Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* Vo. 8 No. 8, 2019 hlm. 843-872.
- Susilowati, N.I., Susilowati, D. & Hadi, S. 2017. Pengaruh Alokasi dana desa, dana desa, belanja modal, dan produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 1, Jilid 4 Tahun 2017 hlm. 514-526.

-
- Tambunan, T.H. 2003. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting*. Jakarta (ID): Ghalia Indonesia.
- Todaro MP, Smith SC. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Munandar H, penerjemah; Bernadi D, editor. Jakarta (ID): Erlangga. Terjemahan dari *Economic Development*. Ninth Edition.
- Umar, H. 2008. *Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wahyudin, dkk. 2019. Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kec Kuala Kabupate Nagan Raya. *Jurnal Nuansa*, Vol. 16 No. 2 Juli-Desember 2019, hlm 181-193.
- Widianto, dkk. 2014. Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Wiguna, R. 2013. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-201p. *Ekonomi Pembangunan*.